

BAB 4

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada Substansi Humas Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Pengelolaan Konten Media Sosial Instagram @kemendagri Sebagai Media Publikasi dan Informasi Publik. Pembuatan akun Instagram @kemendagri merupakan bentuk kepatuhan terhadap sistem komunikasi publik yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital), yang mewajibkan setiap Kementerian atau Lembaga untuk memiliki akun media sosial. Dalam pengelolaan konten media sosial Instagram @kemendagri, dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya diterapkan Teori 4C yang diajukan oleh Chris Heuer, yang meliputi *context, communication, collaboration, dan connection*. Namun, ada beberapa aspek yang sudah mengarah pada penerapan teori ini.

Pengelolaan konten Instagram @kemendagri sudah memiliki alur yang baik, dengan pembagian *jobdesc* yang jelas dalam tim media sosial. Meskipun ada keterbatasan sumber daya manusia, pembagian tugas yang spesifik membantu tim untuk lebih optimal dalam mengelola media sosial. Namun, dalam hal penyusunan konteks konten, pengelola belum sepenuhnya menunjang karena tidak adanya skema pemetaan konteks yang terorganisir. Proses pengelolaan konten lebih condong mengikuti arahan pimpinan daripada rencana yang terstruktur.

Adapun point simpulan antara teori 4C dengan hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Context:** Dalam hal konteks konten, pengelolaan Instagram @kemendagri belum sepenuhnya terorganisir, karena penyusunan konten lebih banyak berdasarkan arahan pimpinan tanpa adanya skema atau pedoman yang jelas.
2. **Communication:** Salah satu aspek teori 4C, yaitu komunikasi, sudah diterapkan dalam pengelolaan Instagram @kemendagri dengan mengoptimalkan kualitas konten agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, walaupun tidak ada interaksi atau komunikasi dengan pengikut, karena tidak ada tanggung jawab untuk memberikan *feedback* untuk mengantisipasi kesalahan dalam memberikan respon.
3. **Collaboration:** Teori *collaboration* sudah diterapkan dalam pengelolaan Instagram @kemendagri, karena ada kolaborasi yang baik antara internal Substansi Humas Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengelola konten seperti dokumentasi, *press release*, dan *editor* bahan konten.
4. **Connection:** Implementasi teori *connection* tidak diterapkan karena kurangnya komunikasi dan interaksi dua arah dengan pengikut, sehingga tidak terjalin hubungan atau kedekatan antara akun Instagram @kemendagri dan masyarakat/pengikut.

4.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan didalamnya. Hal tersebut dapat menjadi referensi serta berbagai pembelajaran untuk penelitian berikutnya. Selain itu, kekurangan dari penelitian ini dapat diperbaiki dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu pada penelitian ini membuat peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan informan lain untuk lebih mendalami dan mengetahui tentang pengelolaan konten media sosial Instagram @kemendagri.
2. Keterbatasan data penelitian karena masih kurangnya data yang diperlukan untuk memperluas bahan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan konten media sosial Instagram @kemendagri.

4.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa rekomendasi saran yang dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan agar mencari data dukung yang lebih banyak untuk menjamin keakuratan data yang lebih baik.
2. Substansi Humas Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perlu mengakurasi dan mempelajari lebih lagi bagaimana media sosial tersebut dapat dikelola dengan kreatif dan

interaktif namun tanpa menimbulkan resiko terhadap Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Agar kedepannya Substansi Humas Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebaiknya merekrut staff media sosial yang berlatar belakang pendidikannya berbasis Ilmu Komunikasi agar yang semula menjadi tantangan menjadi peluang dalam mengembangkan media sosial.